

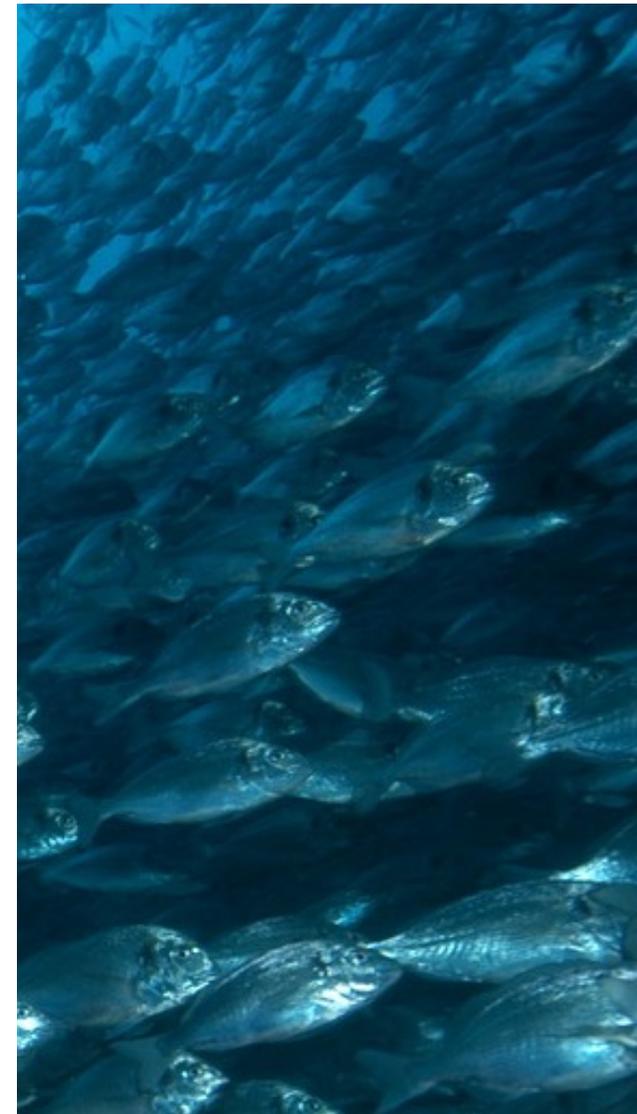


Gambaran Kebijakan PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

*Disampaikan pada acara Sosialisasi Kebijakan Usaha Perikanan Tangkap
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)*

Dr. Ir. Muhammad Zaini, M.M
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Jakarta, 21 September 2021



FILOSOFI PENANGKAPAN TERUKUR



Pembatasan penangkapan ikan perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut.

Ada dua metode pengendalian yang dapat digunakan oleh negara yang memiliki wilayah laut dan stok ikan.



Pengendalian berdasarkan *input*:
Pengendalian Penangkapan Konvensional (tidak terukur)

Pengendalian dilakukan dengan perizinan, tanpa memberikan kuota per kapal.

Race to fish = pelaku usaha berlomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya.

PNBP pra produksi tidak memperhitungkan jumlah tangkapan yang didaratkan sehingga tidak ada fairness, bisa membayar PNBP lebih (rugi), membayar PNBP kurang (untung).

dan
/
atau



Pengendalian berdasarkan *output*:
Pengendalian Penangkapan terukur

Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota.

Hasil tangkapan pelaku usaha berdasarkan kuota (catch limit).

PNBP pasca produksi berdasarkan jumlah tangkapan yang didaratkan.

PNBP berdasarkan kontrak (gabungan pra produksi dan pasca produksi), pemasukan negara dapat diproyeksikan berdasarkan nilai alokasi sumber daya ikan.



KEUNGGULAN DAN KERUGIAN 2 CARA PENGATURAN PENANGKAPAN



	METODE PEMBATASAN	KEUNGGULAN	KERUGIAN	CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN
INPUT CONTROL (penangkapan bebas)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kapal Ukuran kapal Alat tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Barrier to entry</i> rendah, memungkinkan banyak penangkap ikan yang mendapatkan ijin 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebabkan terjadinya <i>externalitas negatif</i> karena jumlah penangkap ikan tidak dibatasi Dapat mengakibatkan terjadinya overfishing Ada insentif melakukan <i>under reporting</i> ukuran kapal Manipulasi produktivitas kapal Akurasi data penangkapan rendah PNBP rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Filipina Vietnam Indonesia (sekarang) Tiongkok (sekarang, namun sedang uji coba penangkapan terukur)
OUTPUT CONTROL (penangkapan terukur)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan Jenis ikan yang ditangkap Kapal dan Alat tangkap Waktu penangkapan Pelabuhan pendaratan <i>(pendaratan ikan di pelabuhan dimana quota penangkapan diberikan)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Stok ikan dan kesehatan laut terjaga Pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal Terjadinya pemerataan ekonomi daerah (pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan) Akurasi data penangkapan Optimalisasi industri di pelabuhan pendaratan Kontrak jangka panjang sehingga ada kepastian pengembalian investasi PNBP tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Barrier to entry</i> tinggi, jumlah penangkap disesuaikan dengan stok ikan yang diijinkan untuk ditangkap Ada insentif pembuangan ikan di laut 	<ul style="list-style-type: none"> Uni Eropa Islandia Kanada Australia Selandia Baru Amerika Serikat Indonesia (mulai 2022) Tiongkok (masa uji coba)



BENCHMARK IMPLEMENTASI PENANGKAPAN TERUKUR

DRAFT



	 SELANDIA BARU	 AUSTRALIA	 AMERIKA SERIKAT	 ISLANDIA	 INDONESIA
Tahun implementasi	1983	1985, implementasi bertahap	1993, implementasi bertahap	1975, untuk seluruh WPP sejak 1991	2022 (rencana)
Implementasi oleh	Pemerintah Pusat	Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah (Negara Bagian)	Pemerintah Pusat	Pemerintah Pusat
Pembagian kuota di tahun pertama implementasi	Berdasarkan tangkapan historis dan kebijakan khusus suku Maori	Berdasarkan tangkapan historis dan kebijakan pemerataan ekonomi	Berdasarkan tangkapan historis nelayan dan kebijakan pemerataan	Berdasarkan tangkapan historis nelayan	Berdasarkan lelang terbuka
Masa berlaku kepemilikan kuota	Selamanya, berkekuatan hukum seperti SHM tanah	1-5 tahun, dengan renewal hampir otomatis	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi, namun ada usulan parlemen menjadi 25 tahun	20 tahun, dengan evaluasi per tahun
Trading / pengalihan kuota	Diperbolehkan, untuk badan milik nasional	Diperbolehkan	Diperbolehkan, asal tidak ada monopoli	Diperbolehkan, dan dapat dipecah	Diperbolehkan atas persetujuan Menteri
Pendapatan negara dari	PNBP & PPh badan	PPN & PPh badan	PNBP, PPN & PPh badan	PNBP & PPh badan	PNBP & PPh badan (produk perikanan tangkap bebas PPN)
Target pendapatan negara	100% biaya <i>enforcement</i> kebijakan termasuk biaya riset	100% biaya <i>enforcement</i> kebijakan	100% biaya <i>enforcement</i> kebijakan s/d 3% nilai ekonomi penangkapan	PNBP 1,5% nilai ekonomi penangkapan	5% nilai ekonomi penangkapan



IMPLEMENTASI PENANGKAPAN TERUKUR DI SELANDIA BARU



INFORMASI UMUM	Luas WPP	96% luas negara Selandia Baru adalah laut: 4,4 juta m ² (EEZ ke 4 terbesar di dunia)
	<i>Spawning ground</i>	30% adalah zona dilarang mancing (<i>spawning ground</i>)
	Hasil produksi	450 ribu ton / tahun
	Tenaga kerja	13.000 pekerja, termasuk 2.500 nelayan
	Ekspor	267 ribu ton (senilai NZD 2 milyar) / tahun
	Penerimaan PNBP	NZD 27 juta / tahun
QUOTA INDUSTRI	Jenis ikan	Quota ditetapkan untuk 98 dari 169 spesies ikan
	Kepemilikan asing	Dilarang, quota hanya untuk warga negara & badan kepemilikan Selandia Baru
	Alokasi quota baru	Lelang terbuka. Quota diberikan ke penawar tertinggi
	Pembatasan kepemilikan	10% s/d 45% dari total quota tidak boleh dimiliki 1 pemilik, tergantung jenis ikan
	Pengenaan PNBP	PNBP bulanan kepemilikan quota, PNBP hasil tangkapan, PNBP transfer kepemilikan quota, PNBP izin memancing, PNBP pendaftaran kapal, PNBP tambahan untuk kapal asing, dst.
	Pengawas di kapal	Ada, untuk mencatat menggunakan <i>log book</i> yang berbeda dengan nahkoda kapal
	Jumlah kapal	~1.500 kapal, ~100 berukuran > 30 meter
QUOTA TRADISIONAL	Jumlah quota	20% dari semua quota yang ditentukan, langsung diberikan untuk suku Maori
	Jumlah hobi mancing	~1,2 juta orang (~30% populasi Selandia Baru)
QUOTA HOBI MANCING	Jumlah tangkapan	Dibatasi 10 s/d 20 ikan per orang per hari, tergantung jenis ikan dan daerah mancing Total tangkapan ~25.000 ton / tahun



KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA DIBANGUN DENGAN PERTIMBANGAN EKOLOGI DAN EKONOMI



Faktor Pendorong



Menjaga **kelestarian ekologi**



Karakteristik sumber daya perikanan merupakan **sumber daya milik bersama**



Peluang **peningkatan produksi perikanan tangkap**



Perlunya regulasi yang menjamin pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan



Peningkatan **PNBP**

Penerapan Kebijakan Mencakup Pengaturan:

1. **Area** penangkapan ikan
2. Jumlah **ikan** yang boleh ditangkap berdasarkan **kuota volume produksi**
3. **Musim** penangkapan ikan
4. Jumlah dan ukuran **kapal**
5. Jenis **alat tangkap**
6. **Pelabuhan** perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan
7. Penggunaan **ABK** lokal
8. **Suplai pasar** domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan
9. Jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan **sistem kontrak** untuk jangka waktu tertentu



NILAI OPTIMUM DAN DAMPAK DARI KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR



Nilai Optimum

1.

Kuota penangkapan yang menunjukkan **ketahanan ekologi sekaligus mendukung ketahanan pangan**

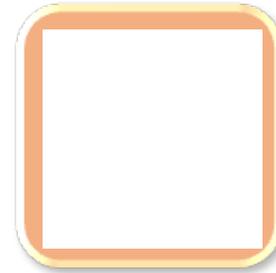
2.

Nilai produksi kuota penangkapan yang menunjukkan **ketahanan ekonomi**

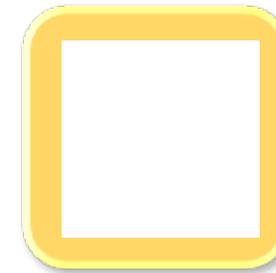
3.

Nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan **ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.**

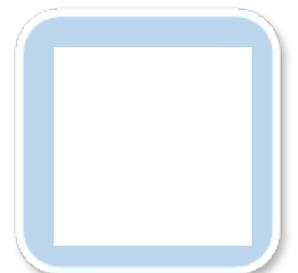
Impact



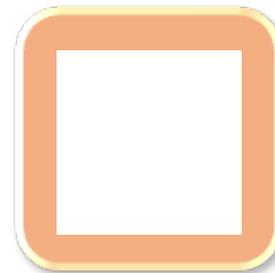
Penambahan penyerapan tenaga kerja



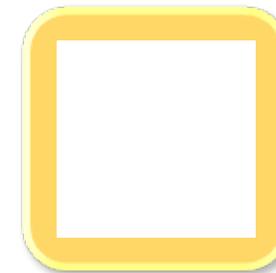
Distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah



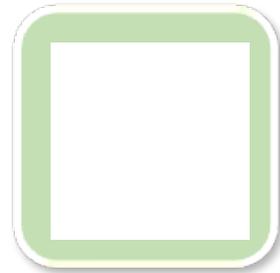
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Kemudahan dalam *Fish Traceability*



Peningkatan PNBP



Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional



RENCANA IMPLEMENTASI PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA



Total stok ikan

Kajian Komnas KAJISKAN, dibuat dan disahkan Menteri KP 2 tahun sekali



% total tangkapan yang diperbolehkan (JTB)

Ditentukan Komnas KAJISKAN

% quota INDUSTRI

Ditentukan oleh KKP

(> 12 mil garis pantai, di 4 zona penangkapan)



1

% quota INDUSTRI (penangkapan terukur) diberikan dengan metode lelang terbuka

Untuk 4-5 investor per zona penangkapan. Dasar ikatan adalah kontrak 20 tahun antara KKP dan investor

2

% quota TRADISIONAL

Untuk kapal nelayan < 30 GT, ber-KTP daerah setempat

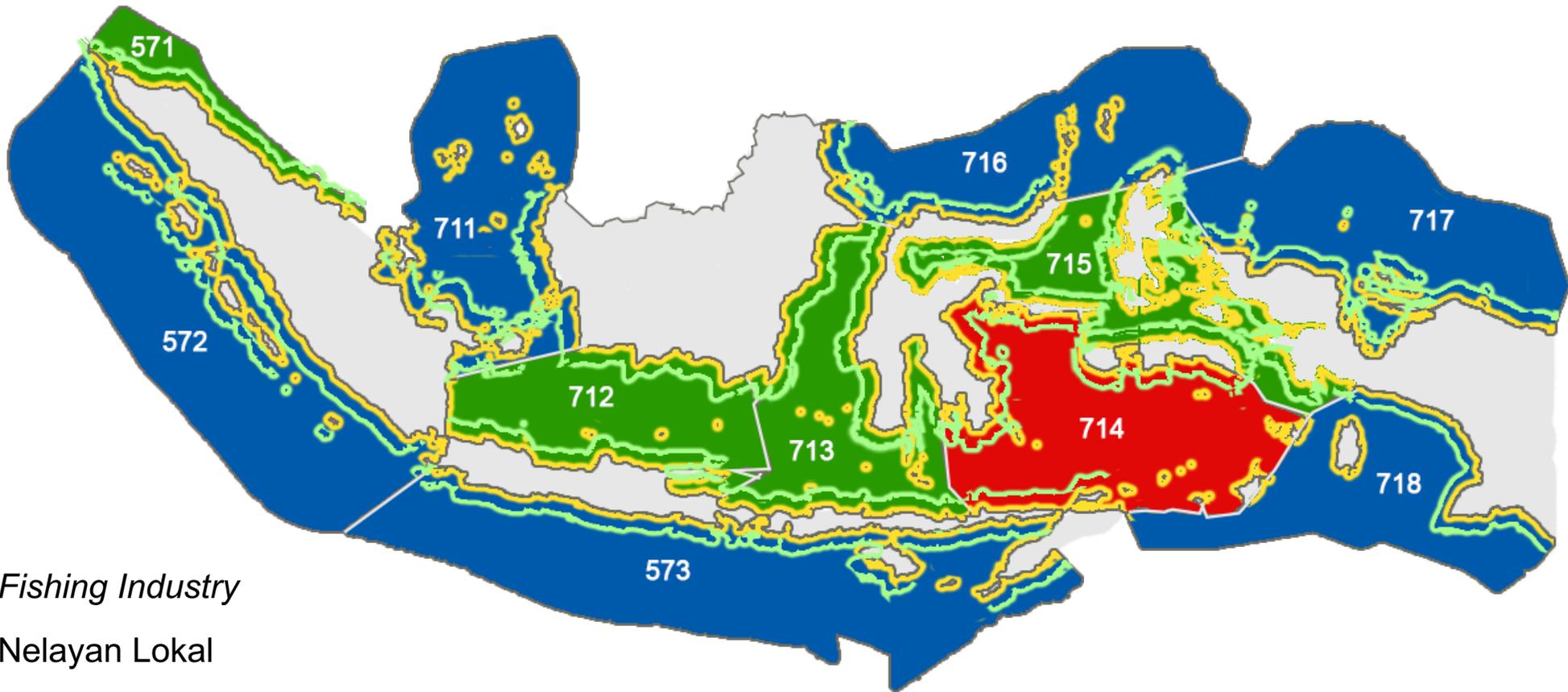
3

% quota HOBI MANCING

Untuk wisatawan, jumlah hasil pancingan dibatasi



PEMBAGIAN ZONA KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI



-  : Zona *Fishing Industry*
-  : Zona Nelayan Lokal
-  : Zona *Spawning & Nursery Ground*
-  : Garis Pantai
-  : 12 mil

Nelayan lokal dengan ukuran kapal <30 GT tetap dapat menangkap di WPP

TOTAL JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN (JTJ): 9.452.072 Ton/tahun
NILAI PRODUKSI TOTAL SE-INDONESIA: Rp 229,3 Trilyun



ZONA *FISHING INDUSTRY*



01 WPP 711

Laut : Laut Natuna & Natuna Utara
 JTB^{a)} : **613.799 ton/tahun**
 JTB^{b)} : **462.047 ton/tahun**
 Nilai^{c)} : Rp 12,7 T/tahun



Pendaratan : PP Barelang-Batam, PP Selat Lampa-Natuna

02 WPP : 572, 573

Laut : Samudera Hindia
 JTB^{a)} : **2.176.495 ton/tahun**
 JTB^{b)} : **1.415.189 ton/tahun**
 Nilai^{c)} : Rp 35,18 T/tahun



Pendaratan : PPS Bungus, PP NZ Jakarta, PP Pelabuhan Ratu, PPS Cilacap, PP Bolok-Kupang, PPN Pengambangan

03 WPP 716, 717

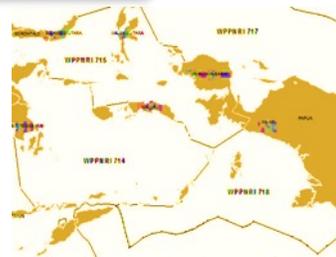
Laut : Laut Sulawesi & Samudera Pasifik
 JTB^{a)} : **1.409.299 ton/tahun**
 JTB^{b)} : **738.000 ton/tahun**
 Nilai^{c)} : Rp 15,8 T/tahun



Pendaratan : PPS Bitung, PP Biak, PPN Ternate, PP Sorong, PP Mansapa-Nunukan

04 WPP 715 (sebagian), 718

Laut : Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor
 JTB^{a)} : **2.764.958 ton/tahun**
 JTB^{b)} : **1.861.500 ton/tahun**
 Nilai^{c)} : Rp 46,12 T/tahun



Pendaratan : Ambon New Port, PPN Tual, PPN Merauke, PP Poumako-Mimika, PP Benjina, PP Sorong, PPS Kendari

DISTRIBUSI JUMLAH TANGKAP YANG DIPERBOLEHKAN (JTB)

JTB TOTAL	6.964.550 ton/tahun senilai Rp. 146,68 triliun
JTB UNTUK NELAYAN LOKAL	2.287.814 ton/tahun senilai Rp. 36,88 triliun
JTB UNTUK KONSESI	4.476.736 ton/tahun senilai Rp. 109,80 triliun

Keterangan

- a) JTB Total
- b) JTB Pemanfaatan Pusat yang ditawarkan
- c) Nilai JTB Pemanfaatan Pusat

JTB = Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (KEPMEN-KP Nomor 50 Tahun 2017)



PERIKANAN BUDIDAYA DI WPP ZONA *FISHING INDUSTRY*



EKSISTING DATA 2019*

01 WPP 711

	Volume	Nilai
KERAPU	2.921 Ton	335,50 Milyar
KAKAP	452 Ton	32,36 Milyar
BANDENG	56.470 Ton	1,11 Trilyun
BAWAL BINTANG	3.510 Ton	100,00 Milyar

02 WPP : 572, 573

KERAPU	7.393 Ton	464,49 Milyar
LOBSTER (BBL benih 5gr)	1,44 juta ekor/tahun	524 Milyar

03 WPP 716, 717

	Volume	Nilai
KERAPU	558,94 Ton	75,95 Milyar
RUMPUT LAUT	1.214.740 Ton	2,95 Trilyun

04 WPP 715 (sebagian), 718

KERAPU	988,75 Ton	132,15 Milyar
KAKAP	69,67 Ton	2,65 Milyar
RUMPUT LAUT	1.315.454 Ton	3,79 Trilyun
KEPITING	988 Ton	197,60 Milyar



PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI ZONA *FISHING INDUSTRY*



Pemilik SIPI/Badan Usaha dapat bergabung dalam suatu wadah koperasi/konsorsium sebagai calon pelaksana konsesi



Investor asing wajib bermitra dengan badan usaha/pelaku usaha dalam negeri



Seleksi pelaksanaan konsesi dilakukan melalui *beauty contest*



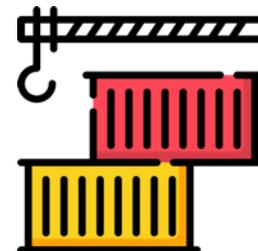
Menandatangani kontrak konsesi penangkapan terukur



Pelaksana konsesi diberikan opsi untuk mengelola pelabuhan dengan membangun sarana prasarana pelabuhan sesuai standar *Eco Fishing Port*



Pengangkutan ikan untuk pasar domestik dan ekspor dari pelabuhan perikanan yang ditetapkan di WPP



Pengangkutan ikan harus menggunakan kapal kontainer berpendingin (*refrigerated container*) atau pesawat



Seluruh awak kapal adalah nelayan lokal (kecuali *fishing master* dan nakhoda kapal untuk kapal buatan Luar Negeri)

BIDANG USAHA YANG **DAPAT DIKELOLA** OLEH PELAKSANA KONSESI SETELAH MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA POKOK PELABUHAN

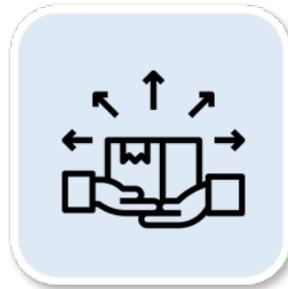
Berdasarkan Pasal 184 ayat (7) PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Pelayanan bongkar muat ikan



Pelayanan pengolahan Hasil Perikanan



Pemasaran dan distribusi ikan



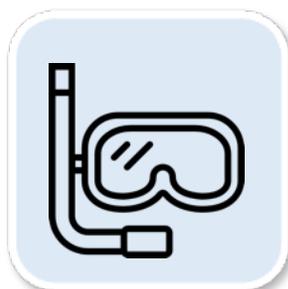
Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum di Pelabuhan Perikanan



Pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan



Pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan



Penyelenggaraan wisata bahari



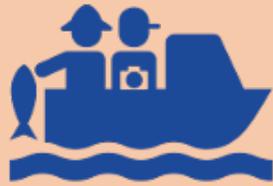
Fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan



Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MULTIPLIER EFFECTS KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR : TERCIPTANYA INDUSTRI DAN LAPANGAN KERJA

USAHA PENANGKAPAN IKAN



ABK yang berasal dari nelayan lokal (usia 20-50 tahun)

Dengan proses rekrutmen dan pelatihan teknis keterampilan penangkapan ikan dan penanganan ikan yang baik berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Balai-Balai Pelatihan

PELABUHAN MODERN

yang bersih & tertata baik



Administrasi kepelabuhanan dan perizinan melaut

AKTIVITAS PELABUHAN



Bongkar muat



Bahan bakar minyak



Air bersih



Perbekalan melaut



Pemeliharaan & perawatan kapal

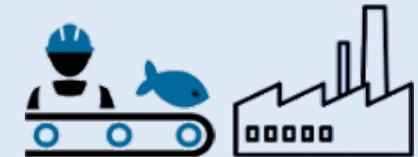


Kebersihan kapal & pelabuhan



Apartemen awak kapal

INDUSTRI PERIKANAN

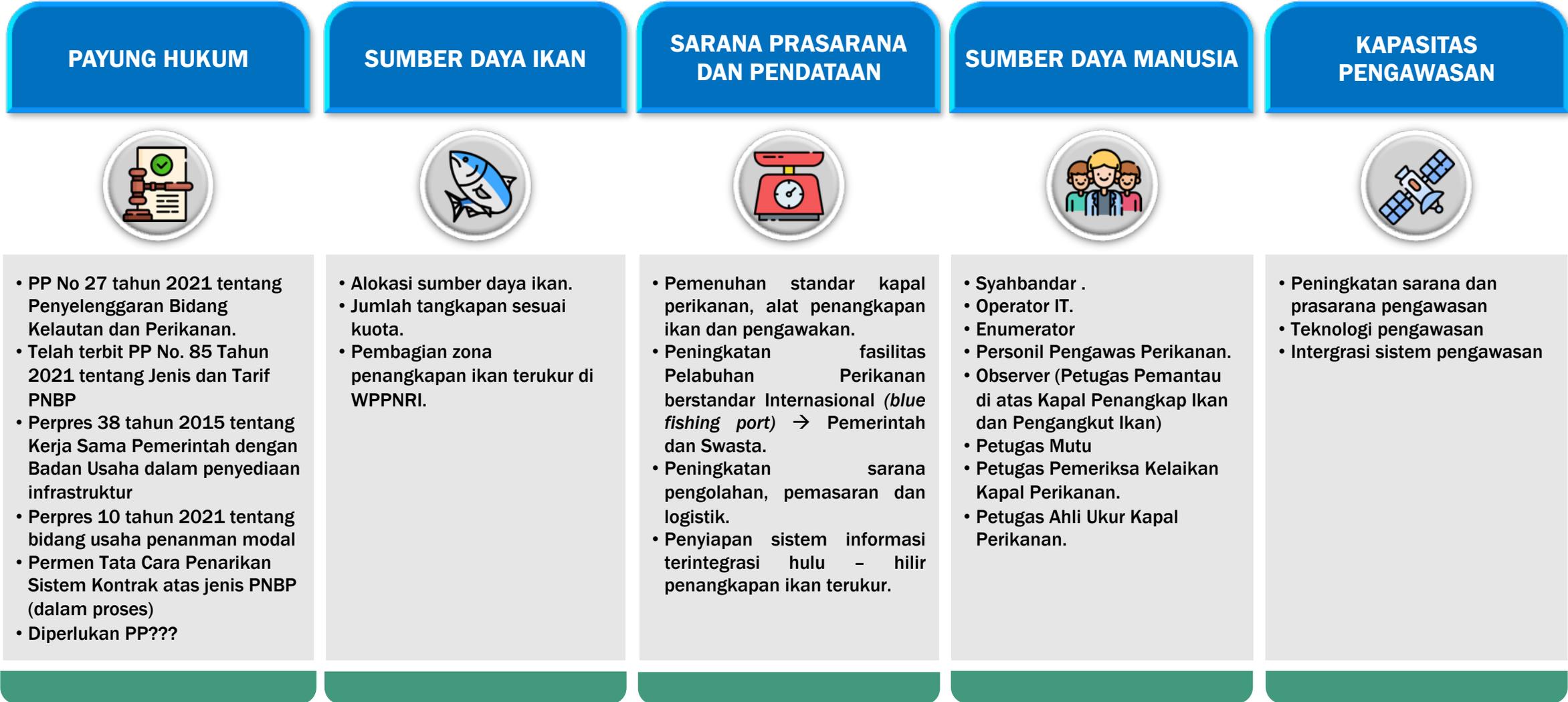


Industri pengolahan ikan dan infrastruktur rantai dingin (cold storage, pabrik es, dll)



Rantai logistik perikanan

PRASYARAT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR



RANCANGAN AWAL - PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPP 715 (sebagian) dan 718



TARGET PRODUKSI BUDIDAYA DI WPP 715 (sebagian) dan WPP 718



**TOTAL NILAI TARGET BUDIDAYA
NILAI : Rp. 18,7 TRILYUN**



RANCANGAN AWAL – KONEKTIVITAS LOGISTIK HASIL TANGKAPAN DI WPP 715 (SEBAGIAN) DAN 718

Pelabuhan Perikanan Prioritas	Status	Pelabuhan Satelit
Ambon New Port (M-LIN)	Hub	Sorong, Tual, Ukurlaran-Saumlaki, Dobo, Benjina, Poumako, Merauke, Omor, Sumuraman, Banda
PPN Tual	Hub	Tamher Timur, Elat, Widuar, Keflik Taar
PP Benjina	Hub	Kalar-kalar, Penambulai
PPN Merauke	Hub	Wanam. Sumuraman
PP Poumako	Sub Hub	Omor
PP Ukurlaran-Saumlaki	Sub Hub	Tiakur, Wetar
PP Sorong	Sub Hub	Klademak, Katapop, Wersar
PPN Kendari	Sub Hub	Sodohoa

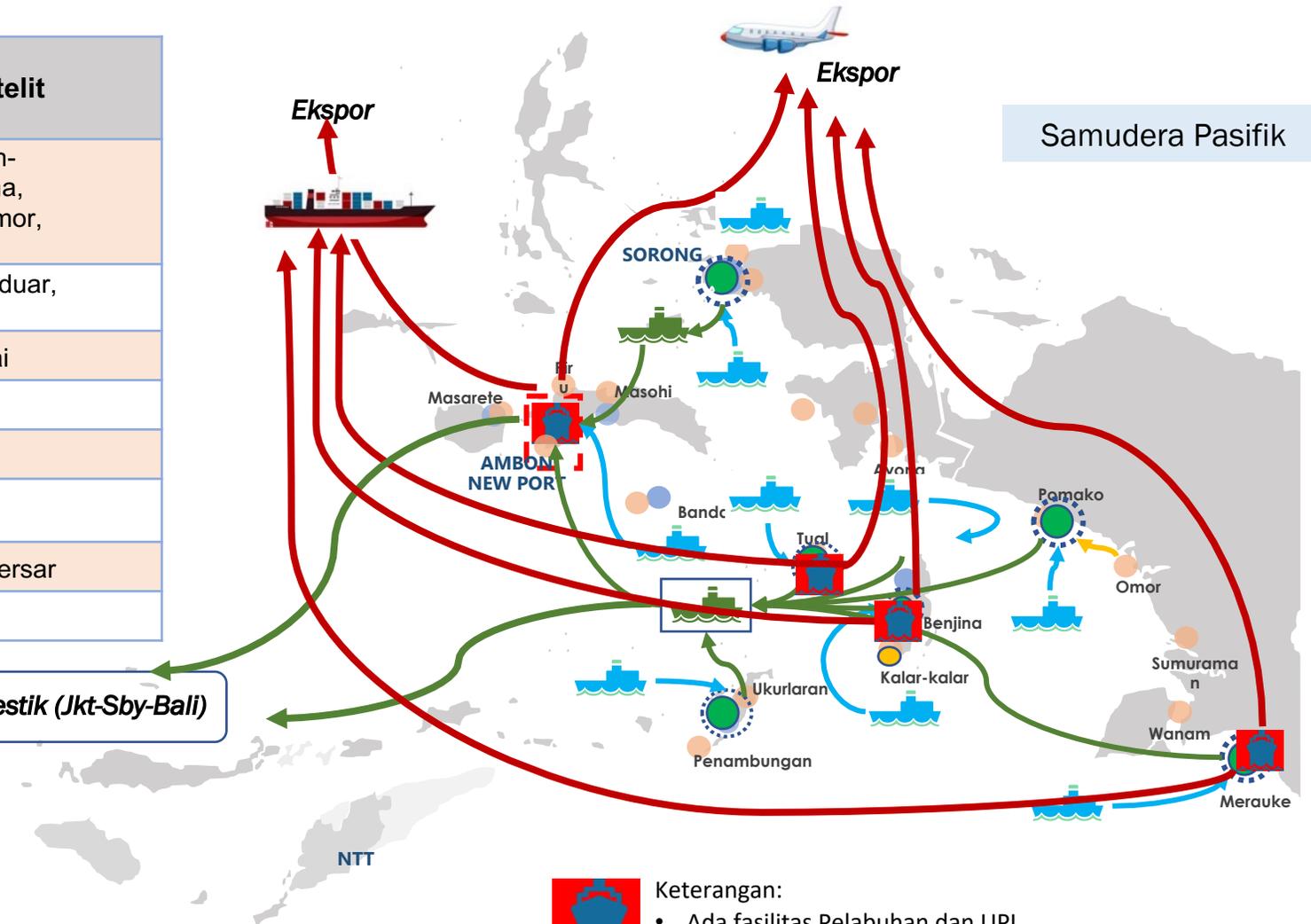


Kapal Penangkap Ikan



Kapal Angkut dengan kontainer dingin

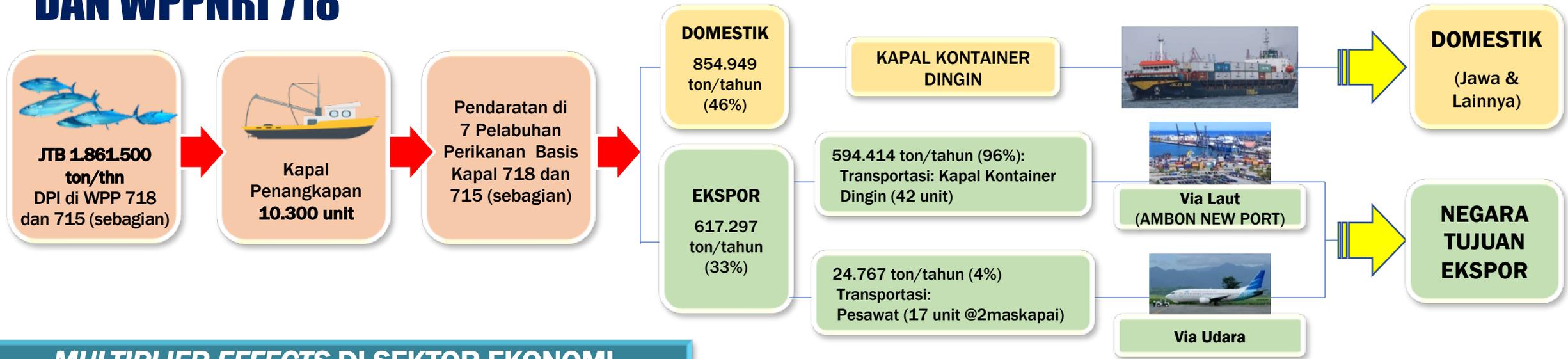
Domestik (Jkt-Sby-Bali)



Keterangan:

- Ada fasilitas Pelabuhan dan UPI
- Ada fasilitas Bandara

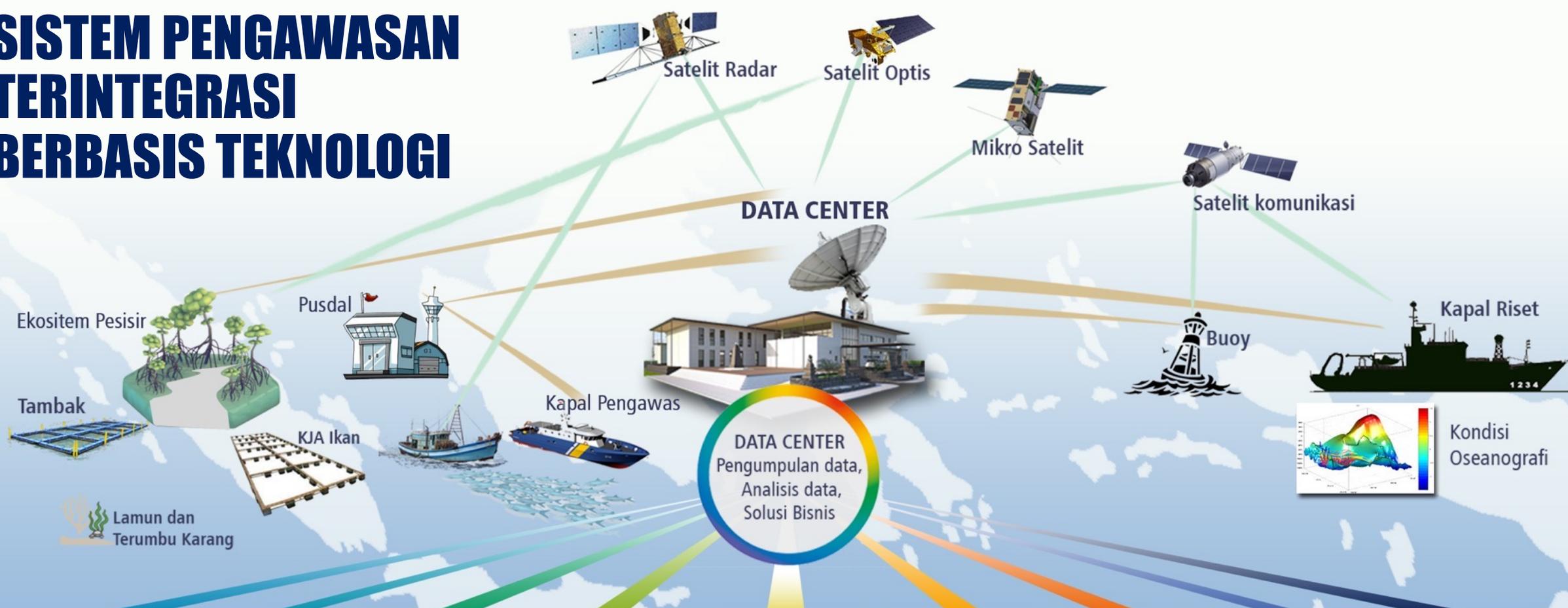
ILUSTRASI BISNIS PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI 715 (SEBAGIAN) DAN WPPNRI 718



MULTIPLIER EFFECTS DI SEKTOR EKONOMI

<p>280.953 Nelayan/Awak Kapal</p>	<p>750 Petugas Pelabuhan Perikanan</p>	<p>PNBP- 6,05 Trilyun/tahun (Maluku 3,59, Papua 1,88, Papua Barat 0,29, Sultra 0,29) (Diusulkan menjadi DANA BAGI HASIL (DBH) untuk Pemda Kab/Kota di provinsi sekitar WPP 718 dan WPP 715)</p>	<p>26.548 Tenaga Kerja Bongkar Muat dan Sektor Informal</p>	<p>9.858 Pekerja di Industri Perikanan/UPI</p>	<p>Industri Perbankan dan Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perputaran uang Rp. 128,50 Trilyun/tahun (dari kegiatan transaksi penjualan ikan hasil tangkapan dan budidaya, penjualan BBM, air bersih, es, logistik perbekalan ABK, bahan alat penangkapan ikan dan transaksi kegiatan docking kapal) Potensi Asuransi untuk Nelayan Rp. 42,14 Milyar/tahun (premi Rp. 150.000/tahun/nelayan)
<p>394 Industri Pengolahan Ikan/UPI 22 Pabrik Es</p>	<p>190 Unit galangan</p>	<p>Apartemen Nelayan (7 unit kap. 2.860 kamar)</p>	<p>PDAM Kebutuhan Air Bersih (1.118.031 m3/th)</p>	<p>Kebutuhan BBM (2,1 Juta KL/th)</p>	

SISTEM PENGAWASAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI



IUU

- IUU Fishing
- Integrasi PPDPi dengan IUU Fishing
- Teknologi deteksi kapal berbasis sinyal radio frekuensi (RF)
- Aplikasi geofencing

OIL SPILL

- Deteksi tumpahan minyak (oil spill)
- Integrasi deteksi tumpahan minyak dengan model trajektori
- Pengembangan geospasial database terintegrasi

STOK IKAN

- Pemodelan biomassa tuna (mata besar, sirip kuning, dan cakalang)
- Pengembangan model biomassa tuna

ONM (OSEANOGRAFI)

- Pemodelan oseanografi pesisir dan laut
- Pemodelan tematik

BUDIDAYA LAUT

- Pemetaan lahan budidaya laut
- Pemetaan kesesuaian lahan dan daya dukung
- Peringatan dini kondisi perairan budidaya laut

TAMBAK DAN BUDIDAYA AIR TAWAR

- Pemetaan lahan eksisting budidaya tambak dan air tawar
- Pemetaan kesesuaian lahan tambak dan daya dukung

MANGROVE DAN ICZM

- Pemetaan ekosistem mangrove
- Penghitungan stok karbon
- Monitoring kesehatan ekosistem mangrove
- Identifikasi spesies mangrove berbasis spasial

TERUMBU KARANG

- Pemetaan sebaran tutupan
- Monitoring potensi wilayah rehabilitasi
- Identifikasi spesies berbasis spasial
- Peringatan dini pemutihan terumbu karang

APLIKASI LAINNYA

- Pemetaan kerentanan pesisir
- Perubahan garis pantai
- Pemetaan/pemantauan sampah Laut



TERIMA KASIH